Jurnal Visionary : Penelitian dan Pengembangan dibidang Administrasi Pendidikan
Volume 10 Nomor 1 2022
https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/visionary
Email: visionary@undikma.ac.id

EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI PROVINSI NTB TAHUN 2021

Lu'luin Najwa[1] Muhammad Iqbal[2] Eneng Garnika[3]

Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Pendidikan Mandalika
Email: lu'luinnajwa@undikma.ac.id muhammadiqbal@undikma.ac.id
enenggarnika@undikma.ac.id

Abstract: *The accreditation of early child education is a series of activities that begin with an assessment of the fulfillment of 8 educational standards then continued with an assessment of 10 components of child growth and development stimulation. This study aims at determining the level of effectiveness of early childhood education in West Nusa Tenggara Province, based on the results of accreditation in 2021. Data from the study were analyzed using descriptive statistical methods and chi square analysis to obtain patterns of relationships between accreditation results with educational pathways, types of service, and districts where early childhood education units are located. The results of this study show that: 1) The result of accreditation of early childhood education units in NTB Province in 2021 out of 600 units, there were 5 units (0.8%) that received grade A, 342 units (57%) with grade B, and 253 units (42.2%) with grade C; 2) The most accredited service programs are Playgroup with 310 units (51.7%) and Kindergarten with 243 units (40.5%); 3) The three regions with the highest number of units are Bima District with 156 units (26%), East Lombok District with 130 units (21.7%), and Central Lombok District with 93 units (15.5%); 4) Chi Square test results show that the variables of Service Programs, Education Pathways, and Districts/Cities are significantly correlated with Accreditation Results; and 5) A total of 347 units (57.8%) have conducted effective stimulation and facilitation, while 253 units (42.2%) units have not been effective.*

Key Words: *Effectiveness, Early Childhood Education, Accreditation*

Abstrak: Akreditasi PAUD merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan penilaian pemenuhan 8 standar pendidikan yang kemudian dilanjutkan dengan penilaian terhadap 10 komponen stimulasi tumbuh kembang anak.Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat efektivitas pendidikan anak usia dini di Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan hasil akreditasi tahun 2021. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif dan analisis chi square untuk memperoleh pola hubungan antara hasil akreditasi dengan jalur pendidikan, program atau jenis layanan, dan kabupaten/kota tempat satuan PAUD berada.Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa: 1) Hasil akreditasi satuan PAUD di Provinsi NTB tahun 2021 dari 600 satuan PAUD, terdapat 5 satuan (0,8%) yang memperoleh nilai A, 342 satuan (57%) dengan nilai B, dan 253 satuan (42.2%) dengan nilai C; 2) Program layanan terbanyak yang diakreditasi adalah KB dengan 310 satuan (51.7%) dan TK sebanyak 243 satuan (40.5%); 3) Tiga daerah dengan jumlah satuan terbanyak adalah Kabupaten Bima dengan 156 satuan (26%), Kabupaten Lombok Timur dengan 130 satuan (21.7%), dan Kabupaten Lombok Tengah dengan 93 satuan (15.5%); 4) Hasil uji Chi Square menunjukkan bahwa variabel Program Layanan, Jalur Pendidikan, dan Kabupaten/Kota berkorelasi signifikan dengan Hasil Akreditasi; dan 5) Sebanyak 347 satuan (57.8%) telah melakukan stimulasi dan fasilitasi yang efektif, sedangkan sebanyak 253 satuan (42.2%) satuan belum efektif.

Kata Kunci: Efektivitas, Pendidikan Anak Usia Dini, Akreditasi

Latar Belakang

Salah satu kata kunci dalam definisi pendidikan di UU Sisdiknas no 20 Tahun 2003 adalah bahwa ia merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Diksi "terencana" kemudian berimplikasi pada keharusan setiap lembaga pendidikan menyusun program pembelajaran secara sistematis agar dapat mencapai tujuannya. Pertanyaan tentang seberapa efektif suatu lembaga pendidikan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajarnya adalah pertanyaan yang tidak akan pernah selesai untuk diajukan. Secara sederhana, efektivitas berarti derajat ketercapaian tujuan dari suatu program yang telah ditentukan sebelum program dijalankan. Spesifikasi tujuan pendidikan akan bervariasi sesuai dengan jenjang, jenis, dan satuan program pendidikan yang dijalankan. Benang merah dari tujuan pendidikan yang bervariasi tersebut, dalam sistem pendidikan nasional, akan merujuk pada bagaimana ketercapaian pelaksanaan dari kriteria minimal yang disebut dengan standar nasional pendidikan.

Salah satu jenjang dalam sistem pendidikan nasional adalah pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan sebelum jenjang sekolah dasar. Dalam UU Sisdiknas, pendidikan usia dini didefinisikan sebagai suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (UU No 20/2003 Pasal 1).Stimulasi tumbuh kembang anak usia dini difokuskan pada aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni (Permendikbud No 137 Tahun 2014 Pasal 10).Sekilas, stimulasi ini nampak tidak cukup berarti. Namun berdasarkan berbagai hasila kajiandi bidang neurologi, psikologi, fisiologi, dan gizi(Uce, 2015), maka tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang terpenting dibandingkan dengan jenjang pendidikan setelahnya. Begitu pentingnya pendidikan anak usia dini juga dapat diindikasikan dengan diterapkannya kebijakan PAUD HI, yang secara sederhana dapat dimaknai dengan dilibatkannya seluruh stakeholder, dari pemerintah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat luas, dalam menjamin kualitas pendidikan yang diberikan pada anak usia dini.

Mengingat pentingnya pendidikan usia dini, diantara pertanyaan besar yang kemudian menarik untuk diajukan adalah bagaimana gambaran hasil stimulasi tumbuh kembang AUD? Apakah tujuan pembelajaran di satuan PAUD telah tercapai? Jawaban terhadap pertanyaan ini tentu memerlukan penelitian yang menyeluruh dan mendalam. Namun, salah satu yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur adalah hasil dari kegiatan akreditasi yang dilakukan setiap tahunnya oleh Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat efektivitas pendidikan anak usia dini di Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan hasil akreditasi tahun 2021.

Kajian Teori

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu lembaga yang memberikan layanan pengasuhan, pendidikan dan pengembangan bagi anak lahir sampai enam tahun dan atau enam sampai delapan tahun, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan non pemerintah (Sujiono, 2013:15). Keberadaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini diatur oleh Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional. Disebutkan bahwa setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini memiliki ciri khusus sesuai dengan jalur pendidikan dimana lembaga tersebut berada. Dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 pada Bab VI pasal 28 menyatakan bahwa: 1) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggrakan sebelum jenjang pendidikan dasar; 2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggrakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal; 3) PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat; 4) PAUD pada jalur nonformal berbentuk KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat; 5) PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga.

Arah pembangunan PAUD di Indonesia adalah 1) meningkatkan ketersediaan layanan PAUD; 2) memperluas keterjangkauan layanan PAUD; 3) meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan PAUD; 4) mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan PAUD; dan 5) menjamin kepastian memperoleh layanan PAUD (Sujiono, 2013: 19). Pendidikan anak usia dini memiliki standar kompetensi yang didasari oleh perkembangan anak. Standar kompetensi ini dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum pendidikan anak usia dini. Standar kompetensi anak usia dini terdiri dari pengembangan aspek-aspek perkembangan sebagai berikut; (a) Moral dan nilai-nilai agama; (b) Sosial emosional; (c) Bahasa; (d) Kognitif; (e) Fisik/Motorik; dan (f) Seni (Asiah, 2018: 53).Fungsi pendidikan bagi anak usia dini yang harus diperhatikan, sebagai berikut: 1) untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahapan perkembangannya: 2) mengenalkan anak dengan dunia sekitar; 3) mengembangkan sosialisasi anak; 4) mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak; 5) memberikan kesempatan pada anak untuk menikmati masa bermainnya (Sujiono, 2013: 52).

Penilaian mutu dalam kelayakan penyelenggaraan pendidikan oleh suatu lembaga pendidikan disebut dengan akreditasi. Berdasarkan Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002, bahwa akreditasi lembaga pendidikan adalah kegiatan penilaian (asesmen) lembaga pendidikan secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi internal dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja lembaga. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 60 (1) menyatakan, "Akreditasi dilakukan untuk menentukan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan." Kemudian ayat (2);" Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik."

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD dan PNF) bertugas untuk mengakreditasi atau melakukan penilaian tentang kelayakan terhaap satuan pendidikan berdasarkan persyaratan minimum yang ditetapkan pemerintah. Kegiatan penilaian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan dan penjaminan mutu lembaga pendidikan bagi masyarakat dalam memilih lembaga baik PAUD dan PNF. Hasil penilaian dari BAN PAUD dan PNF berbentuk pengakuan peringkat kelayakan suatu lembaga pendidikan, hal ini dapat membantu lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, dan memotivasi setiap lembaga pendidikan baik formal maupun non formal untuk mengikuti proses akreditasi.

Tahapan akreditasi berdasarkan Kepmendikbud Nomor 71 P Tahun 2021 secara umum terdiri dari 3 tahap, yaitu Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA), Visitasi, dan terakhir tahap Validasi dan Verifikasi. Tahap KPA adalah proses pemeriksaan terhadap pemenuhan 8 standar pendidikan, yaitu 1) tingkat pencapaian perkembangan anak, 2) isi, 3) proses, 4) pendidik dan tenaga pendidikan, 5) sarana dan prasarana, 6) pengelolaan, 7)

pembiayaan, dan 8) penilaian. Suatu lembaga baru dapat mengikuti jika telah memenuhi nilai KPA minimal 600.

Tahapan berikutnya dari proses akreditasi adalah visitasi, yaitu melakukan kunjungan ke lembaga untuk menilai secara langsung bagaimana proses penyelenggaraan pendidikan di lembaga tersebut. Penilaian dilakukan terhadap 10 komponen yang diukur menggunakan instrumen penilaian visitasi (IPV) yang terdiri dari 26 butir. Komponen yang dinilai sebagian besar terkait dengan stimulasi terhadap tumbuh kembang anak. Kesepuluh komponen tersebut adalah 1) nilai agama dan moral, 2) fisik motorik, 3) kognitif, 4) bahasa, 5) sosial emosional, 6) proses pembelajaran, 7) inovasi layanan belajar dan pengembangan profesionalitas PTK, 8) keamanan dan lingkungan, 9) dukungan orang tua, dan terakhir 10) perilaku hidup sehat. Jika tahapan visitasi selesai, kemudian dilanjutkan dengan tahap validasi dan verifikasi, yaitu suatu proses memeriksa ulang hasil penilaian yang dilakukan pada saat visitasi.

Status akreditasi yang dapat diperoleh lembaga adalah A, B, C, atau Tidak Terakreditasi (TT). Status A diperoleh jika nilai akreditasinya > 850; B jika nilainya 701 – 850; C dengan rentang 551 – 700; dan TT dengan nilai kurang dari 551. Secara sederhana, misalkan nilai akreditasi yang diperoleh adalah 875 (status A), berarti performansi lembaga dalam melaksanakan kesepuluh komponen dalam IPV adalah sebesar 87,5%. Atau jika suatu lembaga memperoleh nilai akreditasi 600 (status C), dapat dimaknai bahwa performansi lembaga dalam melaksanakan komponen-komponen dalam IPV adalah sebesar 60%.

Mahmudi (2005: 92) mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Pendapat lain juga dijelaskan oleh Muhidin (2009) bahwa efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna. Padanan kata efektivitas dalam Bahasa Indonesia adalah keberhasilan, dimana suatu program dikatakan efektif jika ia berhasil mencapai tujuan dari program tersebut (Iqbal, 2018).Dengan redaksi berbeda, efektivitas dikaitkan dengan sejauh mana sebuah program dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Najwa & Muslim (2019).

Terdapat beragam cara untuk menentukan tingkat ketercapaian tujuan dari suatu lembaga pendidikan. Beberapa indikator yang sering digunakan adalah seperti hasil UN, evaluasi terhadap implementasi program, jumlah alumni yang diterima di sekolah unggulan atau PTN unggulan, prestasi siswa dalam berbagai lomba yang diselenggarakan di luar lingkungan sekolah, dan akreditasi. Akreditasi merupakan salah satu tahapan dalam desain besar sistem pendidikan, menjadi salah satu protokoler yang berbasis penelitian untuk mengevaluasi efektivitas suatu lembaga pendidikan (Hendarman, 2013).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa akreditasi PAUD merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan penilaian pemenuhan 8 standar pendidikan yang kemudian dilanjutkan dengan penilaian terhadap 10 komponen stimulasi tumbuh kembang anak. Jika dihubungkan dengan kriteria sekolah yang efektif (Safitri dkk, 2021; Saminathen dkk, 2018; Ahmad, 2014), maka kegiatan akreditasi ini merupakan, seluruh rangkaian kegiatan akreditasi merupakan proses penilaian efektivitas sebuah lembaga pendidikan. Perbedaan yang sering muncul adalah pada kapan sebuah sekolah dikatakan efektif. Kriteria ini dapat ditentukan secara subyektif selama memiliki pertimbangan yang logis (Azwar, 2004: 108). Berdasarkan pendapat ini, maka suatu lembaga akan dikatakan efektif jika

memperoleh nilai akreditasi B, yang dapat dimaknai dengan sekitar 70% sampai 85% stimulasi dan fasilitasinya telah berjalan dengan baik. Suatu lembaga akan dikatakan belum efektif, jika nilai akreditasi yang diperolehnya adalah C, karena performansi pendidik dan satuan memperoleh skor kurang dari 70%.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Variabel penelitian terdiri dari 4 variabel kategorik, yaitu Program, Kabupaten/Kota, Jalur Pendidikan, dan Hasil Akreditasi. Sumber data adalah Surat Keputusan BAN PAUD PNF tentang Status Akreditasi Satuan PAUD dan PNF Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 (https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/download-center). Jumlah satuan setingkat PAUD yang diakreditasi pada tahun 2021 adalah sebanyak 600 satuan. Data hasil akreditasi ini akan dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif dan analisis chi square untuk memperoleh pola hubungan antara hasil akreditasi dengan jalur pendidikan, program atau jenis layanan, dan kabupaten/kota tempat satuan PAUD berada.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kegiatan akreditasi PAUD di wilayah kerja BAN PAUD PNF Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan pada bulan Agustus, September, dan November tahun 2021. Jumlah satuan yang mengikuti proses akreditasi adalah sebanyak 600 satuan yang tersebar pada 10 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari seluruh lembaga tersebut, jumlah terbanyak adalah program layanan berbentuk KB sebanyak 310 satuan (51,7%), kemudian diikuti oleh TK sebanyak 243 satuan (40,5%). Sedangkan TPA hanya terdiri dari 2 satuan. Berdasarkan lokasi satuan, daerah dengan jumlah satuan terbanyak adalah Kabupaten Bima dengan 156 satuan (26%), kemudian diikuti oleh Kabupaten Lombok Timur sebanyak 130 satuan (21,7%), dan daerah dengan jumlah satuan paling sedikit adalah Kabupaten Sumbawa Barat dengan 8 satuan (1,3%) dan Kabupaten Lombok Utara dengan 10 satuan (1.7%).

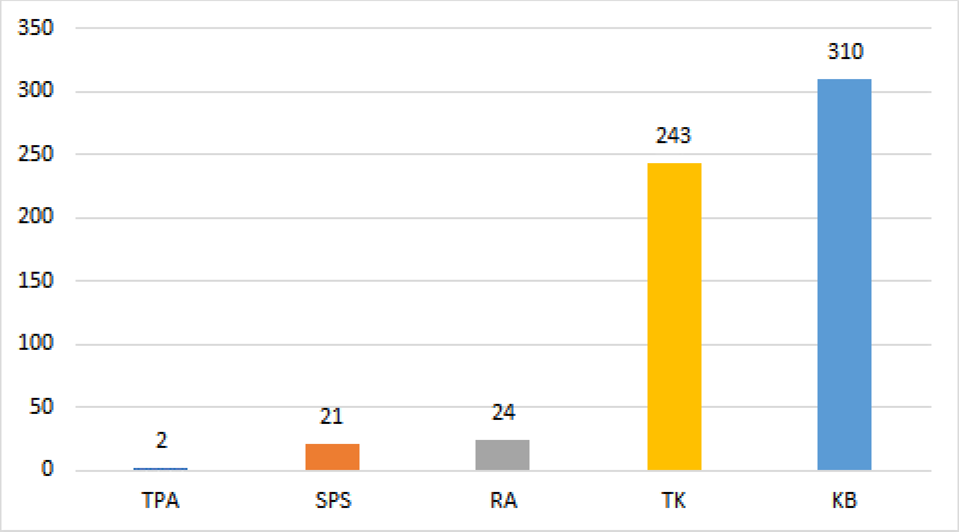

Gambar 1. Jumlah Satuan PAUD yang Diakreditasi Berdasarkan Program Layanan

Jurnal Visionary : Penelitian dan Pengembangan dibidang Administrasi Pendidikan
Volume 10 Nomor 1 2022
https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/visionary
Email: visionary@undikma.ac.id

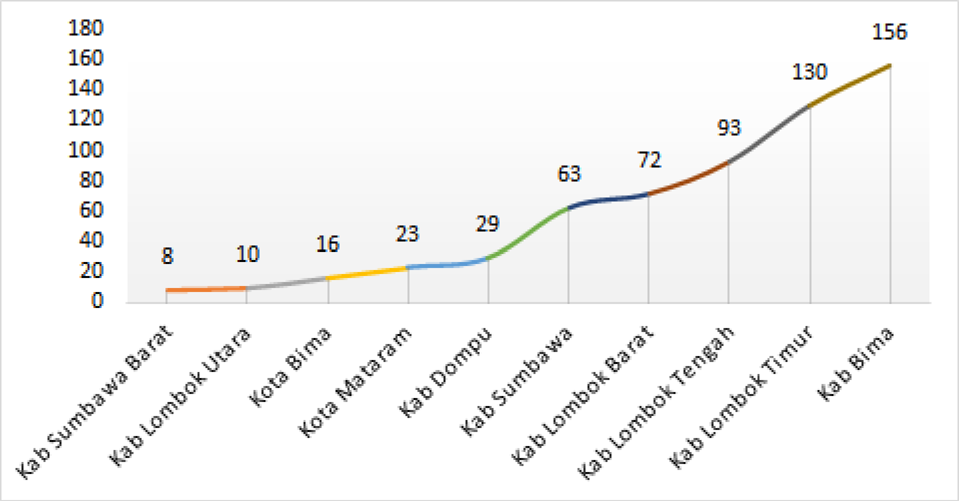

Gambar 2. Jumlah Satuan PAUD yang Diakreditasi Berdasarkan Lokasi

Berdasarkan jalur pendidikannya, dari 600 satuan setingkat PAUD yang mengikuti kegiatan akreditasi, terdapat 267 atau sekitar 44,5% satuan yang termasuk dalam jalur pendidikan formal, yaitu RA dan TK. Jumlah satuan yang masuk dalam jalur pendidikan non formal adalah sebanyak 333 satuan atau sekitar 55,5%, yang terdiri dari KB, SPS, dan TPA. Deskripsinya dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.

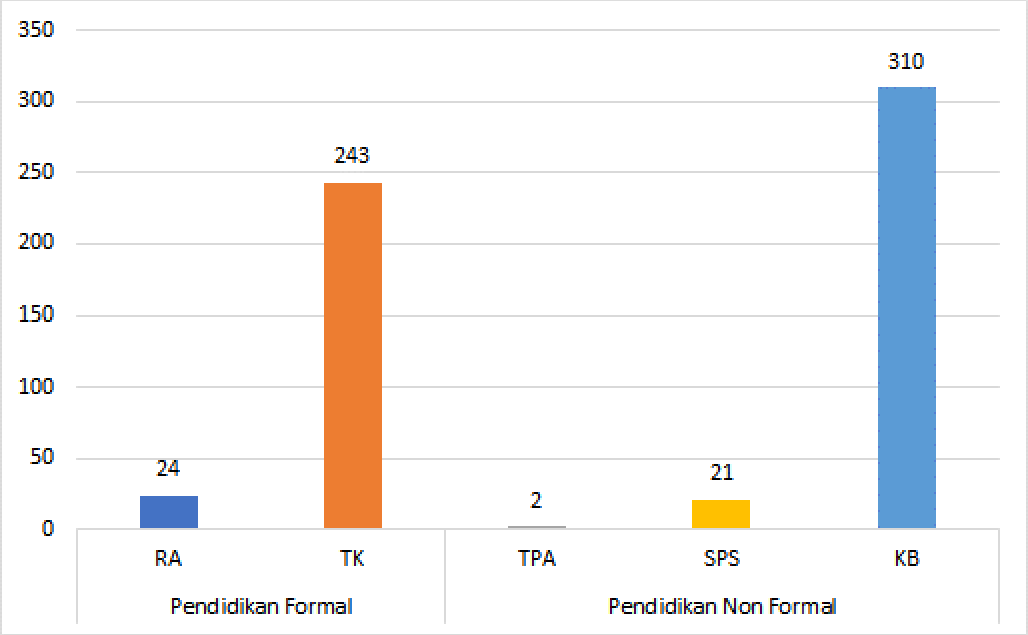

Gambar 3. Jumlah Satuan PAUD yang Diakreditasi Berdasarkan Jalur Pendidikan

Hasil akhir menunjukkan bahwa dari 600 satuan yang diakreditasi, jumlah satuan dengan nilai akreditasi A adalah sebanyak 5 satuan (0.8%), nilai B sebanyak 342 satuan 57%), dan nilai C sebanyak 253 satuan (42.2%).

Jurnal Visionary : Penelitian dan Pengembangan dibidang Administrasi Pendidikan
Volume 10 Nomor 1 2022
https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/visionary
Email: visionary@undikma.ac.id

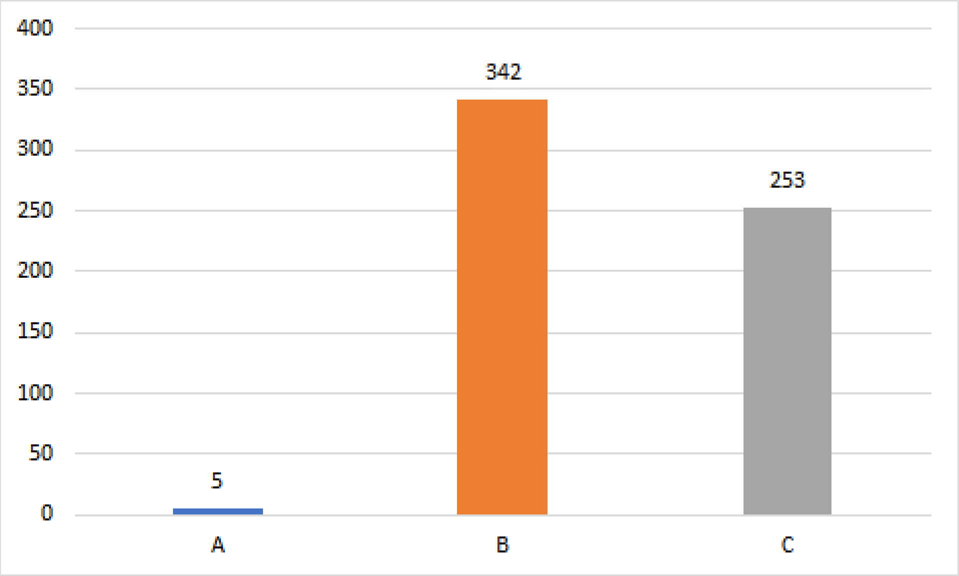

Gambar 4. Hasil Akreditasi Satuan PAUD Provinsi NTB Tahun 2021

Jika dilihat dari jenis layananya, nilai akreditasi yang diperoleh dapat disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Akreditasi Satuan PAUD Provinsi NTB Tahun 2021
Berdasarkan Jenis Layanan

No	Program Layanan	Hasil Akreditasi			Jumlah
		A	B	C	
1	TPA	0	2	0	2
2	TK	4	160	79	243
3	SPS	0	12	9	21
4	RA	0	15	9	24
5	KB	1	153	156	310
Jumlah		5	342	253	600

Berdasarkan Tabel 1 di atas, statistiknya menunjukkan bahwa KB memiliki proporsi hasil akreditasi C yang lebih besar dibandingkan dengan jenis layanan yang lain. Secara proporsi juga, jumlah satuan ini memang paling banyak, yaitu 51.7%, lebih dari separuh satuan yang mengikuti akreditasi pada tahun 2021.

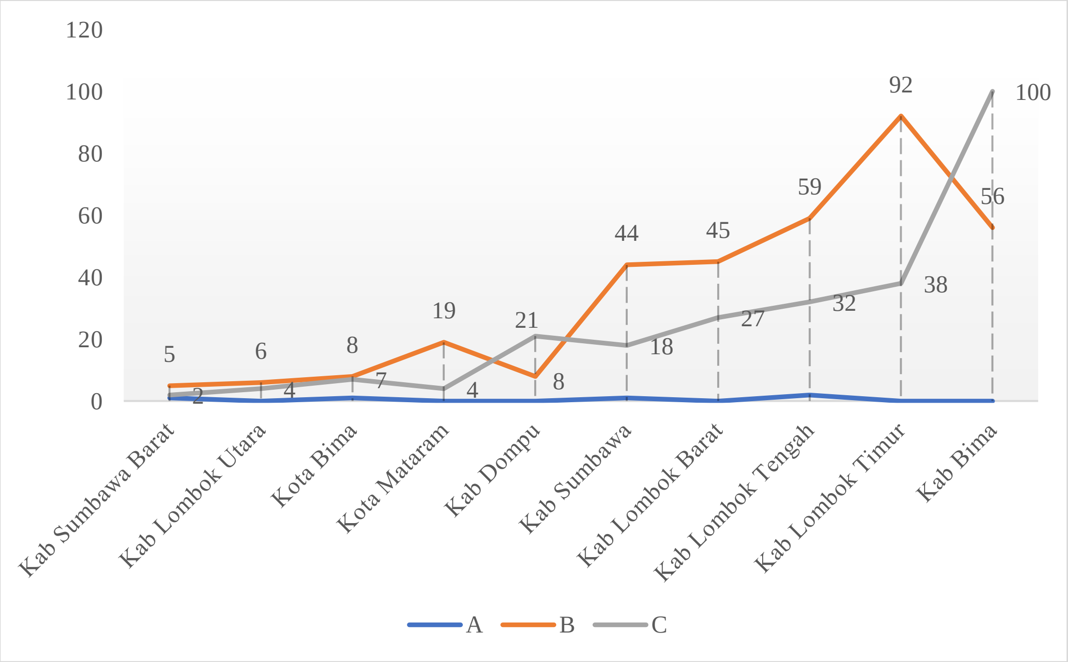

Gambar 5. Sebaran Hasil Akreditasi Satuan PAUD Berdasarkan Lokasi

Gambar 5 menunjukkan bagaimana sebaran hasil akreditasi berdasarkan kabupaten/kota lokasi satuan. Dari gambar tersebut terlihat bahwa nilai akreditas A terlihat relatif datar pada seluruh daerah. Nilai B dan C relatif bervariasi. Tiga daerah dengan nilai akreditasi B terbanyak adalah di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Bima. Tentu jumlah ini harus memperhatikan jumlah satuan yang diakreditasi pada masing-masing daerah. Tiga daerah tersebut juga mencatatkan nilai akreditasi C terbanyak. Dan untuk Kabupaten Bima, dari total 156 lembaga, tercatat ada 100 satuan yang memperoleh nilai akreditasi C, 56 satuan dengan nilai B, dan tidak ada yang memperoleh nilai A.
Hasil analisis Chi Square yang diperoleh adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Analisis Chi Square

No	Variabel	Chi Square	Koefisien Kontingensi	Signifikansi
1	Program Layanan dan Hasil Akreditasi	21.811	0.187	0.005
2	Jalur Pendidikan dan Hasil Akreditasi	18.384	0.172	0.000
3	Kabupaten/Kota dan Hasil Akreditasi	88.845	0.359	0.000

Berdasarkan Tabel 2 di atas, variabel Program Layanan, Jalur Pendidikan, dan Kabupaten/Kota asal satuan berkorelasi secara signfikan dengan hasil akreditasinya. Kekuatan korelasinya dapat dikatakan relatif rendah, yaitu antara 0,172 sampai 0,359. Dari ketiga variabel bebas tersebut, yang berkorelasi paling kuat dengan hasil akreditasi adalah Kabupaten/Kota asal satuan. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa jika seluruh satuan pendidikan anak usia dini di provinsi NTB diakreditasi, maka hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan 600 satuan yang diakreditasi pada tahun 2021.

Efektivitas suatu lembaga pendidikan tentu tidak dapat hanya didasarkan pada hasil akreditasi. Untuk satuan PAUD, hasil akreditasi akan dapat memberikan gambaran tentang kualitas stimulasi dan fasilitasi yang dilakukan pendidik dan satuan di lembaga. Hasil akreditasi satuan PAUD di Provinsi NTB tahun 2021 di atas menunjukkan bahwa dari 600 satuan yang diakreditasi, terdapat 5 satuan (0.8%) dengan nilai A, 342 satuan (57%) nilai B, dan 253 satuan (42.2%) memperoleh nilai C. Merujuk pada kriteria efektivitas yang telah ditentukan sebelumnya, maka angka efektivitas lembaga PAUD di Provinsi NTB, berdasarkan hasil akreditasi tahun 2021 sudah cukup bagus, yaitu sebanyak 347 satuan atau sekitar 57.8% telah berhasil melaksanakan stimulasi dan fasilitasi pendidikan anak usia dini. Namun, statistik juga menunjukkan bahwa masih terdapat jumlah satuan yang signifikan, yaitu sebanyak 253 satuan atau sekitar 42.2%, yang masih harus banyak berbenah, karena nilai stimulasi dan fasilitasi yang sudah dilakukan masih di bawah 70%. Jumlah satuan ini tentu tidak sedikit. Misalkan 1 lembaga memiliki 20 anak didik, maka akan ada 5060 anak yang belum memperoleh layanan pendidikan anak usia dini yang memadai. Jumlah ini akan menjadi sangat kritis mengingat bahwa usia anak tersebut adalah usia keemasan, dimana masa depan mereka akan banyak ditentukan oleh bagaimana mereka tumbuh dan berkembang di usia dini.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa program layanan, jalur pendidikan, daerah asal satuan dapat menjelaskan hasil akreditasi yang diperoleh. Data menunjukkan bahwa jumlah satuan yang diakreditasi tidak berkorelasi positif dengan hasil yang diperoleh. Khusus untuk variabel Kabupaten/Kota asal satuan, terdapat daerah dengan jumlah satuan yang sangat banyak, namun belum dibarengi dengan program peningkatan kualitas pendidikannya. Ide awal untuk pemerataan akses pendidikan, khususnya untuk anak usia dini, nampaknya sudah tercapai. Namun sekarang saatnya seluruh stakeholder menyusun strategi dan bekerja bersama untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas satuan yang sudah ada.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diberikan berdasarkan kajian di atas adalah: 1) Hasil akreditasi satuan PAUD di Provinsi NTB tahun 2021 menunjukkan bahwa dari 600 satuan, terdapat 5 satuan (0,8%) yang memperoleh nilai A, 342 satuan (57%) dengan nilai B, dan 253 satuan (42.2%) dengan nilai C; 2) Program layanan terbanyak yang diakreditasi adalah KB dengan 310 satuan (51.7%) dan TK sebanyak 243 satuan (40.5%); 3) Tiga daerah dengan jumlah satuan terbanyak adalah Kabupaten Bima dengan 156 satuan (26%), Kabupaten Lombok Timur dengan 130 satuan (21.7%), dan Kabupaten Lombok Tengah dengan 93 satuan (15.5%); 4) Hasil uji Chi Square menunjukkan bahwa variabel Program Layanan, Jalur Pendidikan, dan Kabupaten/Kota berkorelasi signifikan dengan Hasil Akreditasi; dan 5) Sebanyak 347 satuan (57.8%) telah melakukan stimulasi dan fasilitasi yang efektif, sedangkan sebanyak 253 satuan (42.2%) satuan belum efektif.

Daftar Pustaka

Ahmad, Syarwan (2014). Execelent School, Status and Its Existence. Jurnal Englisia Vol 1 No 2 Edisi Mei 2014 halaman 155-170, eISSN 2527-6484

Ali Muhidin Sambas, 2009, *Konsep Efektivitas Pembelajaran*, Pustaka Setia,Bandung.

Azwar, S (2003). *Reliabilitas dan validitas.* Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Azwar, S. (2004). *Penyusunan skala psikologi.* Cetakan VI. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Asiah, Nor. Siti. (2018). *Analisis Manajemen PAUD Berbasis Standar Akreditasi PAUD danPNF di Kutai Kartanegara.* Syamil. volume 6. No 1 halaman 51-64 eISSN: 2477-0027.

Hendarman (2013), Pemanfaatan Hasil Akreditasi dan Kredibilitas Asesor Sekolah/Madrasah, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol 19 No 4: 532-542
https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/download-center

Iqbal, Muhammad. (2018). *Efektivitas Penyelenggaraan Pendidikan dan alternative Pendekatan Penelitian Efektivitas.* Jurnal Visionary vol 5 (1) Edisi April 2018. E-ISSN (2656-7563)

Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002

Kirk, D.J. and Jones, T.L., Effective Schools: Assessment Report., New Jersey: Pearson Education, Inc., 2004.

Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja sektor publik. yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Maria Granvik Saminathen, Sara Brolin Låftman, Ylva B. Almquist & Bitte Modin(2018)Effective schools, school segregation, and the link with school achievement,School Effectiveness and School Improvement,29:3,464-484,DOI: 10.1080/09243453.2018.1470988

Najwa, Lu'luin & Muslim, Ahmad. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Jurnal Visionary vol 4 (2) Edisi Oktober 2019 halaman 108-115 E-ISSN (2656-7563).

Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014

Safitri, S., Francisca, F., Handali, K.A., Ariyanti, T.D., (2021). Applying School Effectiveness Principle as School System: A Case Analysis in Leading Primary School in Indonesia. Proceedings of the Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities Universitas Indonesia Conference (APRISH 2019). DOI: https://doi.org/10.2991/assehr.k.210531.087

Sujiono, N. Y. (2013). *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. PT Indeks: Jakarta.

Uce, Loeziana (2015). The Golden Age: Masa Efektif Merancang Kualitas Anak. *Jurnal Pendidikan Anak Bunayya,Vol 1 No 2,* 77-92.

UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003.